

PENGARUH INVESTASI ASING TERHADAP EKONOMI PERDAGANGAN MASA KESULTANAN PALEMBANG TAHUN 1724-1825

¹Dewi Setyawati, ²Heryati, ³Yuliarni

¹Dosen Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : destya11@gmail.com

²Dosen Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : Heryatitoya15@gmail.com

³Dosen Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : Yuliarnierie1@gmail.com

Abstract

The Palembang Sultanate in the 17th to 19th centuries was the background for the lives of the people of Palembang. This period becomes interesting when it is connected to the world of trade because the Palembang Sultanate had collaborated with the VOC in 1642. This had an influence on the trade economic system during the time the Sultan of Palembang was in power at that time. This research uses historical methods and literature studies. The historical method has several stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The aim of this research is to determine the influence of foreign investment on the trade economy of the Palembang Sultanate period 1724-1825 because at that time the Palembang Sultanate carried out trade relations, especially spices, especially pepper and tin, both domestically and abroad.

Keywords: Palembang, Sultanate, Trade, Islamic Education.

Abstrak

Kesultanan Palembang pada abad ke 17 hingga 19 menjadi latar belakang kehidupan masyarakat Palembang. Masa ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan dunia perdagangan karena Kesultanan Palembang pernah menjalin kerja sama dengan VOC pada tahun 1642. Hal ini memberikan pengaruh terhadap sistem perekonomian perdagangan pada masa Sultan Palembang berkuasa saat itu. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan studi literatur. Metode sejarah mempunyai beberapa tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap perekonomian perdagangan Kesultanan Palembang periode 1724-1825 karena pada saat itu Kesultanan Palembang melakukan hubungan dagang khususnya rempah-rempah khususnya lada dan timah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Keywords: Palembang, Kesultanan, Perdagangan, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Palembang memiliki tanah relatif datar dengan sebagian besar didominasi tanah yang tergenang air, baik pada waktu hujan maupun setelah turun hujan, terlebih ketika pasang dan hujan datang (Irwanto,2010 : 7). Keuntungan secara strategis, Palembang, menyebabkan kota ini mendapat posisi sebagai kota pelabuhan, walaupun tidak terletak di daerah pantai. Pelabuhannya yang aman, dengan jaringan-jaringan sungai yang menciptakan jalur perhitungan dengan daerah pedalaman dan jalur rawa yang membentang jauh ke pedalamannya, membuat Palembang terlindung dari serangan darat. Keadaan inilah yang menyebabkan hidupnya dunia perdagangan dan perniagaan di kota Palembang.

Peranan pelabuhan Palembang dan daerah sekitarnya bertambah penting sebab ditopang oleh keberadaan Sungai Musi. Sungai itu merupakan induk Sungai Ogan, Lematang, Beliti, Lakitan, Komering, Rawas, Rupit, Kelingi, dan Batanghari Leko yang disebut Batangharisembilan. Jalur sungai Batanghari Sembilan (Supriyanto, 2013 : 4) Jalur sungai Batanghari Sembilan memiliki peranan sangat penting, yaitu untuk terjalinnya komunikasi dan transportasi dari daerah Pedalaman menuju pelabuhan.

Sungai musu membelah kota Palembang menjadi dua daerah, yaitu hulu dan hilir memiliki peranan yang paling penting sebagai lalu lintas masuknya kapal-kapal dari luar menuju kota sebagai pusat pemerintahan. Sementara kota Palembang merupakan penampung produksi dari daerah pedalaman dan sebagai pintu gerbang menuju pelabuhan.

Situasi di Palembang mengalami naik-turun setelah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya, Sementara pada abad ke-14 dan ke-15 kekuatan Sriwijaya bergeser ke kerajaan pedalaman Minangkabau dan ke Melaka yang terletak di pesisir, Palembang Muncul kembali dalam wujud Kesultanan Islam di bawah pengaruh Jawa, dan kondisi perekonomiannya kembali bangkit pada abad ke-16 berkat melalui sungai Musi. Hal ini berhasil menarik perhatian pembeli lada dari Cina, Portugis, Belanda dan Inggris (Anthony, 2010 : 146)

Lada menjadi komoditas ekspor utama pada abad ke-17 dari kepulauan nusantara, terutama di Sumatera. Pada awal abad ke 16 dikatakan oleh Pires bahwa Aceh tidak banyak menghasilkan lada. Hingga awal abad ke-17 pun kondisi tersebut tidak berubah, menurut Beaulieu (pada tahun 1621), "Sekarang ini belum mencapai 500 bahar setiap tahun, lagi pula kecil-kecil ladanya", lebih lanjut dikatakannya bahwa karena keperluan akan beras, salah seorang raja terdahulu telah menyuruh cabut pohon-pohon lada (Lombard, 1991: 101)

Pada pertengahan abad ke-17, Palembang merupakan salah eksportir lada di nusantara bagian barat. Karena tingginya permintaan lada pada pasar Cina dan Eropa. Sehingga penanaman pohon meluas sejak tahun 1640 dan setelahnya, permintaan tenaga kerja dari daerah Nusantara bagian Timur seperti Sulawesi, Bugis dan Makassar menyebabkan terjadi perbudakan di Nusantara bagian barat

termasuk Palembang. Hal tersebut juga menyebabkan kelebihan produksi lada di bagian Sumatra dan jatuhnya harga lada di Eropa (Ricklef, 2008 : 143).

Sebelum mengenal sistem perkebunan dari Barat, masyarakat di negara-negara berkembang mengenal sistem kebun sebagai bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional. Dalam struktur ekonomi pertanian tradisional, usaha kebun sering merupakan usaha tambahan atau pelengkap dari kegiatan pertanian pokok, terutama pertanian pangan secara keseluruhan. Sistem kebun biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada dasar, dan lebih berorientasi pada kebutuhan subsistem (Sartono, 1991 : 4).

Proses komersialisasi di daerah Indonesia sendiri diawali dari proses pertumbuhan hubungan simbiotik antar-daerah. Hubungan simbiotik, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan perdagangan, antara lain terjadi hubungan simbiotik antara daerah persawahan penghasil padi dan daerah ladang penghasil tanaman perdagangan, dan antara daerah kepulauan satu dengan daerah kepulauan yang lain. Sebagai contoh, Hubungan simbiotik dalam organisasi perdagangan maritime antara antara Palembang dan daerah lain awal abad ke 16 dan 17 dapat dilihat dari corak pertukaran komoditi perdagangan dari kedua belah pihak Pesisir seperti Pesisir Jawa-Sumatera Selatan : Kapas, madu, paraffin, (wax), rotan, lada, emas, semuanya diangkut ke Jawa.

Pada tahun 1642, traktat VOC-Palembang secara teoretis memberi hak monopoli kepada VOC untuk mengeksport lada Palembang . Kemudian pada tahun-tahun berikutnya Sultan Palembang juga menandatangani perjanjian lain dengan Portugis yang mengizinkan mereka terus berdagang di sana. Pada tahun 1655, VOC berusaha menerapkan hak-hal traktat 1642-nya di Palembang (Ricklefs, 2008 : 145).

Mengenai perkembangan Islam di masa kesultanan Palembang, Minsih (2010) menulis dalam penelitiannya berjudul *—Perkembangan Islam Pada Masa Sultan Muhammad Baharudin Di Kesultanan Palembang (1776-1805)* bahwa pada awal abad ke-16 setelah lepas dari kekuasaan Mataram Islam di Jawa, kesultanan Palembang berdiri menjadi wilayah kesultanan yang bercorak Islam dengan cakupan wilayah kekuasaan meliputi Lampung Utara hingga daerah Krui, pulau Bangka dan Belitung, dan eks karesidenan Palembang, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Aria Kusuma Abdurrahman.

Keberadaan kesultanan Palembang secara otomatis menjadi pintu masuk yang sangat efektif untuk proses islamisasi di wilayah ini. Secara umum sejak awal sebelum berdiri secara defacto kesultanan Palembang yang mandiri, proses islamisasi secara kultural dan alamiah telah terjadi. Adapun saluran-saluran islamisasi yang terjadi dan penyebaran Islam di Palembang dilakukan dengan jalan damai dan berlangsung dalam beberapa tahap. Proses Islamisasi dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf (Rochmiatun, 2016:47).

Pengaruh ekonomi juga berpengaruh terhadap kemajuan Pendidikan Islam di Palembang, Proses Islamisasi dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf (Rochmiatun, 2016, p. 58). Fakta ini sesuai dengan pola islamisasi yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Sebagaimana diketahui hampir seluruh ahli dan pengamat sejarah menyepakati, bahwa proses Islamisasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi khususnya perdagangan. Dalam konteks ini, perluasan atau penyebaran komunitas muslim berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, menurut Rockmiatun (2016) saluran perkawinan merupakan tahapan sesudah adanya adaptasi antara pedagang muslim (Arab) dengan penduduk setempat. Adapun saluran tasawuf dan sastra juga berperan dalam proses penyebaran Islam. Adapun tokoh atau yang berperan dalam proses penyebaran Islam di Palembang diantaranya adalah para pedagang, ulama, maupun para ulama ahli Tasawuf.

Pembentukan tradisi keilmuan dan pengajaran agama Islam di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, tampaknya telah dimulai pada era Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-18. Lembaga pendidikan agama di Kesultanan Palembang Darussalam dikelola oleh para birokrat agama melalui pengajian di masjid dan di rumah pejabat agama. Oleh karena itu di Palembang tidak muncul pesantren sebagaimana di Jawa (Rahim, 1998 : 171)

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, kraton dijadikan sebagai pusat studi Islam dan sastra. Dalam tradisi Kraton Melayu, menulis merupakan pekerjaan yang terhormat. Munculnya kraton sebagai pusat studi Islam dan sastra tentu saja karena patronase (Niswah, 2015 : 388).

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini penulis gunakan adalah metode Sejarah (Metode Historis). Menurut Gottschalk mengatakan yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dalam (Herlina, 2008 : 2). Metode historis adalah cara untuk membatasi rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti bukti untuk menegakkan suatu fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 1988 : 73). Metode sejarah dalam pengertiannya secara umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perpektif historik (Abdurrahman,2011: 103). Metode penelitian penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Investasi Asing terhadap Ekonomi Perdagangan Masa Kesultanan Palembang tahun 1724-1825. Langkah-langkah penelitian sejarah antara lain, pertama Heuristik. Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak sejarah biasanya dilakukan diperpustakaan, tinjauan kepustakaan hanya dapat dilakukan apabila topik yang akan dipelajari telah dipilih dan dirumuskan (Sair, 2012 : 10). Menurut Gottschalk berdasarkan daftar bacaan beserta tempat berada sumber itu, maka harus mendatangi suatu perpustakaan (Herlina, 2008 : 92). Selain penelusuran

buku juga dilakukan observasi dan wawancara. Kedua, Kritik sumber (Penilaian data) adalah penilaian atau tahap pengujian terhadap sumber sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan diliat dari sudut pandang nilai kebenaran, dengan demikian melalui sumber diharapkan agar setiap data-data sejarah diberikan hendak di uji terlebih dahulu validitas dan rehabilitasinya, sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya (Daliman, 2012 : 66). Ketiga, Interpretasi adalah menetapkan makan dan saling hubungan antara fakta fakta yang diperoleh. Keempat, historiografi atau penulisan sejarah ialah cara merekontruksi suatu gambaran masa lamapau berdasarkan data yang diperoleh (Kuntowijoyo,2013 : 89). Hal yang sangat penting dalam suatu penulisan sejarah adalah pendekatan (*approach*). Masalah Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan untuk meninjau serta mengupas suatu permasalahan, dapat ditentukan cara dalam menganalisis permasalahan, dan menjadi titik awal dalam meninjau permasalahan. (Yass, 2004 : 47). Penggunaan pendekatan bertujuan dengan pokok pembahasan pendekatan yang penulis gunakan. Pendekatan sosial dan ekonomi di dalam tulisan ini akan menyoroiti masalah hubungan baik antara Kesultanan Palembang terhadap masyarakat yang multicultural serta perdagangan rempah-rempah yang maju baik dalam negeri dan luar negeri.

PEMBAHASAN

Ekonomi Perdagangan Masa Kesultanan Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757)

Pada masa kesultanan Palembang, sultan membagi perkampungan kotanya tersebut berdasarkan ruang air, yaitu kampung-kampung yang berbentuk delta akibat dikelilingi anak-anak sungai Musi sehingga penduduk Palembang mendirikan rumah di setiap aliran anak sungai Musi. Setiap yang tinggal di daratan berkewajiban untuk mengabdikan kepada Sultan. Pada saat itu juga Sultan membuat kebijakan terkait tempat tinggal orang Asing (Tionghoa, Arab, dan Eropa serta Melayu) untuk tidak tinggal di ruang daratan, kecuali mereka yang dianggap berjasa untuk keraton (Irwanto, 2011 : 32).

Palembang mengalami periode perselisihan suksesi setelah kematian Sultan Abdul Rahman pada tahun 1706, yang berakhir dengan naiknya Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757) (Ricklefs, 2008 :145). Ekonomi Palembang mulai tergantung pada produk baru. Produksi lada mereka sedang menurun pada awal Abdul Rahman berkuasa dan makin menurun di akhir masa kekuasaannya. Tapi sekarang timah telah telah ditemukan di Bangka, negara bawahan Palembang. Awalnya, para penambang kebanyakan berasal dari Bugis. Mengendalikan Bangka dan Belitung sesungguhnya adalah tujuan utama Mahmud Badaruddin I.

Pada tahun 1731, satu pasukan VOC membantunya memadamkan perlawanan Bugis terhadap Bangka. Setelah itu, para penambang Cina mulai banyak berdatangan. Di akhir masa pemerintahan Sultan, konon terdapat sekitar 25 hingga 30 ribu orang Cina di Bangka. Seperti halnya atas lada Palembang, atas

timah di Palembang juga dikuasai VOC (Rickle, 2008 : 149). Secara teori, mendapat hak monopoli melalui traktat. Namun, monopoli itu sebetulnya hanya untuk tidak lebih dari separuh hasil produksi yang diberikan VOC. Sisanya dijual dalam perdagangan "Liar", dimana harganya jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan VOC. Sultan berpartisipasi dalam perdagangan ini dan menjadi kaya karenanya.

Kekayaan dan gaya pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I membuat ia meraih reputasi tinggi di Palembang. Ia berkonsultasi dengan orang-orang terkemuka dan memerintah berdasarkan consensus, cara yang dipakai oleh raja-raja di Nusantara yang bijaksana. Ia beruntung memerintah di masa ketika pengaruh VOC sudah turun, ketika keuangan VOC memburuk dan mereka makin terlibat dalam urusan dalam negeri Jawa. Bagi VOC, Palembang berbiaya tinggi, biaya yang hampir tidak bisa diimbangi dari hasil penjualan timah. Para pegawainya di sana seperti layaknya di tempat-tempat lain, seringkali diragukan kompetensi kejujurannya, serta kurang menguasai bahasa Melayu, bahasa utama di Nusantara. Hubungan dengan para elite dan masyarakat umum di Palembang sering tegang.

Pada masa Sultan Ahmad Tajuddin (1757-1774), penambang timah Cina di Bangka amat sulit dikendalikan kerajaan. Sehingga sultan menugaskan para bangsawan Palembang terkemuka untuk bertanggung jawab atas hampir semua distrik di sana. Orang cina merespon dengan berpindah tambang-tambang di tempat lain, khususnya Kalimantan dan Perak. Pada tahun 1780-an, diperkirakan jumlah orang Cina di Bangka merosot dari 25.000-30.000. Tiga tahun sebelumnya 6000-13.000. Tentu saja produksi merosot, sebagian perdagangan timah terus dilaksanakan di luar kontrol Sultan maupun VOC (Ricklef, 2008 : 151).

Pengaruh Ekonomi Perdagangan terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Masa Sultan Mahmud Badaruddin I (1742-1757 M)

Husni (2006) menjelaskan bahwa pada abad ke-7 telah terjalin hubungan dagang dan diplomatik antara pedagang Arab dengan Nusantara dan Cina. Namun hubungan ini masih sekedar hubungan antar negara dalam sebuah upaya untuk menjalin hubungan kerja sama ekonomi (perdagangan), seperti perdagangan barang-barang yang diminati dari Nusantara seperti komoditas kapur barus, emas, lada, kayu manis, damar dan rempah-rempah lainnya. Bahkan beberapa catatan mengenai kedatangan utusan dan pedagang Muslim ke Barus dan di pelabuhan Sumatera lainnya yang dikuasai Sriwijaya pernah didokumentasikan.

Hasil penelitian L.W.C. v.an den Berg (1989) menunjukkan bahwa orang Arab Hadramaut mulai datang secara massal ke Nusantara pada tahun-tahun terakhir abad ke-18, sedangkan kedatangan mereka di Pantai Malabar jauh lebih awal. Perhentian mereka yang pertama adalah Aceh. Dari sana kemudian sebagian menyebar ke Palembang dan Pontianak. Sejak abad yang lalu, di Pulau Sumatera koloni Arab yang besar hanya ada di Aceh dan Palembang. Koloni Arab yang ada di Palembang dianggap yang paling menarik, baik dari sudut pandang sosial maupun

dari sudut pandang ekonomi perdagangan. Pada awal abad ke-19, Sultan Palembang yang bernama Sultan Mahmud Badaruddin, memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada bangsa Arab untuk menetap di ibukota negerinya.

Martin van Bruinessen menyatakan, Pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada 1596 dan menyaksikan bahwa orang-orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari Mekkah. Di Palembang, istana atau keraton kesultanan juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Para Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan, seperti Sultan Ahmad Najamuddin I (1757-1774) dan Sultan Muhammad Baha'uddin (1774-1804), dan Sultan Mahmud Badaruddin I dan Sultan Mahmud Badaruddin II. Setelah kemunduran Aceh sebagai pusat studi Islam muncul Palembang sebagai pusat studi Islam dan sastra (1750-820 M). Kebiasaan memelihara ulama kraton telah dirintis sejak masa Sultan Mahmud Badaruddin 1 (1742-1757 M) (Niswah,2015 :391), Sebagai pusat studi ilmu agama dan sastra, kegiatan kajian agama cukup berkembang dan maju pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Apalagi Sultan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap agama. Ini dikarenakan Sultan Najamuddin dan Sultan Mahmud Badaruddin merupakan orang-orang yang taat beragama, bahkan Sultan Mahmud Badaruddin II adalah seorang yang hafiz (penghafal Alqur'an). Sultan Mahmud Badaruddin sendiri sering menjadi imam shalat di masjid. Ulama-ulama menjadi tempat tersendiri dalam kehidupan Sultan. Beliau selalu berada di dekat ulama untuk mendiskusikan soal-soal keagamaan.

Palembang sebagai pusat pendidikan keagamaan dapat dipandang sebagai bentuk keberperanan keraton Islam dalam mengembangkan pengajaran agama Islam di wilayah Palembang khususnya, bahkan sebagai rujukan pengajaran agama Islam di seluruh daerah uluan atau desa-desa di Sumatera Selatan (Abdurrahmansyah, 2020 : 67)

Sampai dengan runtuhnya Kesultanan Palembang, perkembangan ilmu-ilmu Islam belum banyak menyentuh masyarakat umum khusus di Palembang maupun wilayah lain di Sumatera Selatan. Sejak tahun 1830-an terdapat berbagai indikasi bahwa proses Islamisasi di Sumatera Selatan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Indikasi yang paling jelas dapat dilihat melalui wacana kolonial tentang Palembang yang, antara lain menyebutkan bahwa penduduk Kota Palembang sangat saleh dan taat memenuhi kewajiban keagamaan mereka. Bahkan, sejak tahun 1880-an tingkat religiusitas orang-orang Palembang makin terlihat antara lain melalui ramainya orang-orang dari berbagai strata sosial yang mengunjungi Masjid Agung untuk shalat Jum'at. Ibadah puasa pada bulan Ramadhan, dan minat melakukan ibadah haji ke Mekkah yang cukup tinggi (Peeter, 1997 : 6).

Tingkat religiusitas masyarakat Palembang yang makin meningkat juga terlihat pula dari munculnya kecenderungan dan keinginan masyarakat untuk belajar agama. Dari kegiatan belajar agama inilah tradisi pendidikan Islam di

Palembang terbentuk. Pada awalnya (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20) tradisi ini mengambil format pengajaran agama di rumah atau di langgar (Ismail, 2014 : 3)

Sistem pengajaran pendidikan di Sumatera Selatan dalam hal pendidikan Islam hampir sama dengan di Jawa. Perkembangan lebih lanjut sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Sumatera Selatan tampaknya hanya sedikit berbeda dengan perkembangan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di beberapa wilayah lain di Indonesia (Enung, 2004: 40)

Ekonomi Perdagangan Masa Kesultanan Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803)

Pada masa Kesultanan Sultan Muhammad Bahaudin sampai akhir kesultanan Palembang memiliki pola yang sama dalam sistem perdagangan, yakni monopoli perdagangan dikuasai oleh Sultan. Di samping itu ada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahaudin mulai diadakan pembagian tugas secara jelas dan sistematis. Pemerintahan Kesultanan diatur secara baik dan dibantu oleh aparat keamanan. Selain itu telah muncul peraturan-peraturan bagi pedagang-pedagang atau para pendatang (Supriyanto, 2013:49).

Penguasa Palembang, terutama Sultan Muhammad Bahaudin selalu memperhatikan keamanan di perairan Sungai Musi dan sekitarnya dari serangan perompak. Oleh karena itu para pedagang asing singgah di Palembang karena di situ tidak banyak gangguan keamanan dan terdapat barang dagangan yang laku di pasaran dunia, seperti lada dan timah. Di samping itu letak Pelabuhan Palembang cukup strategis, tidak terlalu jauh dari muara sungai ke arah Selat Bangka.

Untuk mengatur lalu lintas perdagangan, Sultan mengangkat pejabat yang disebut *syahbandar* yang berkuasa di Pelabuhan. Ia bertugas menyangkut kepentingan Sultan yang ada hubungannya dengan pelayaran dan perdagangan, seperti melindungi pedagang-pedagang dari gangguan rakyat, memajukan perdagangan dan pelayaran, melancarkan perdagangan dan urusan mereka serta mengusahakan agar utang piutang mereka dibayar, juga menerima bea dari pedagang-pedagang itu. Selain itu, tugas Syahbandar adalah untuk mengadili para pedagang asing yang melakukan kesalahan di daerah sekitar pelabuhan. Tetapi kekuasaan pengadilan dari syahbandar ini kemudian beralih kepada kepala tertinggi kompeni (Gadjahnata, 1998:118).

Setiap kapal yang keluar masuk Pelabuhan Palembang dipungut bea-cukai oleh petugas Syahbandar. Besar kecilnya bea cukai didasarkan atas jumlah anak kapalnya (Boedenani dan David,1961 : 26) Hasil pemungutan bea-cukai dari kapal-kapal dagang itu, oleh syahbandar diserahkan kepada Sultan Palembang. Di samping itu untuk memperlancar transaksi perdagangan para nahkoda kapal sering menyerahkan hadiah-hadiah yang berupa bingkisan atau uang kepada Sultan sebagai penguasa tertinggi di Kesultanan Palembang (Tim Peneliti IDKD, 1984 : 18).

Sultan Palembang mendapat bantuan keuangan dari suatu lembaga yang disebut *Fexo*, kasir Sultan. *Fexo* berasal dari pedagang melayu yang kaya sehingga

sering memberikan bantuan keuangan kepada Sultan. Oleh karena itu ia diberikan kekuasaan untuk memerintah sebagian wilayah tertentu yang termasuk kekuasaan Sultan Palembang. Kesultanan Palembang memiliki sumber keuangan dari perdagangan timah, lada dan hasil hutan. Tambang timah terdapat di Pulau Bangka yang dikelola oleh orang-orang Melayu dan Cina. Sultan memberikan subsidi, upah dan biaya hidup kepada para penambang, tetapi timah dihasilkan dibeli oleh sultan dengan harga yang telah ditentukan (Supriyanto, 2013 : 50).

Sultan Muhammad Bahauddin mengelola tambang timah di Pulau Bangka lebih serius. Ia mendatangkan pekerja-pekerja atau penambang dari Siam, sedangkan untuk pengawasannya didirikan rumah-rumah oleh Tumenggung Dito Menggalo. Sultan biasanya menempatkan demang atau jenang sebagai pengawas di daerah penambang timah. Daerah penambang timah yang mendapat perhatian secara serius oleh Sultan, yaitu Sungai Buluh, Tempilang, Biat, Bunut, Bendul, Rambat, Panji, Layang, Sungai Liat, Cengal, Pangkal Pinang, Kobar, Balar, dan Tobali (Wieringa, 1990 : 87).

Perdagangan timah di daerah Kesultanan Palembang mengalami kemajuan yang cukup ramai. Oleh sebab itu Sultan Muhammad Bahauddin mengeluarkan uang pitis yang dibuat di Mentok. Nilai tukarnya, yaitu 2000 pitis sama dengan 2 ½ (dua setengah) gulden. Uang itu dapat ditukarkan dengan uang perak atau uang logam jika dipergunakan di luar Nusantara. Di samping itu beredar pula uang ringgit Belanda, yaitu *Hollandsche Rijdsdaalder* nilainya sama dengan 2 gulden 60 sen, *Spaanshe Matten* atau *Pilaardollar* yang bernilai 2 gulden 25 sen atau sampai 2 gulden 40 sen, ringgit Maria Theresia, dolar Amerika, rupee, Pagoda Siam, uang perak Spanyol nilainya 2 gulden 20 sen sampai 2 Golden setail. Uang ringgit Spanyol atau *Spaansche Matt* bernilai 8 real (Wieringa, 1990 : 90).

Di Pulau Bangka berlaku sejenis pajak yang harus dibayar setahun sekali bagi setiap lelaki yang sudah menikah kecuali orang Melayu dan Johor. Pajak itu bisa berupa beras, lada, dan lain-lain yang nilainya telah ditetapkan Sultan. Pemungutan pajak itu dilakukan oleh utusan Sultan (Gajahnata, 1988 : 97). Di samping itu Sultan Muhammad Bahauddin menempatkan beberapa menteri untuk mengawasi keamanan di daerah itu. Mereka bertugas memberantas penyedelundup timah, gangguan perompakan, dan perjudian. Di samping itu bagi para aparat pemerintah yang melakukan kejahatan atau menyalahgunakan kedudukannya dijatuhi hukuman berat atau hukuman mati (Wieringa, 1990 : 104).

Pada 1772, VOC membeli timah dari Bangka untuk dikirim ke Eropa. Disamping itu VOC berusaha membujuk Sultan Palembang agar timah dan lada dijadikan barang monopoli perdagangan. Pada 1773 dan 1774, VOC melakukan transaksi pembelian lada sejumlah 6721 pikul. Selain itu orang-orang Cina membawa timah secara besar-besaran dari Bangka ke Kanton. Timah digunakan oleh orang-orang Cina sebagai bahan pelapis kotak the (Supriyanto, 2013 : 53).

Dengan kemerosotan pembelian lada itu, VOC melakukan pembaruan kontrak dengan Sultan Palembang pada tahun 1776. Oleh sebab itu VOC mampu mengendalikan perdagangan timah dan lada di Kesultanan Palembang. Sultan Palembang diharuskan menyerahkan kepada VOC setiap tahunnya 30.000 pikul timah dengan harga 13,5 ringgit perpikulnya untuk daerah Palembang dan 15 ringgit di Batavia. Di samping itu setiap tahunnya sultan diharuskan menyerahkan kepada VOC lada 20.000 pikul dengan harga 6 ringgit di Batavia dan 5 ringgit di Palembang. Akan tetapi Sultan Palembang hanya menyerahkan separuh dari permintaan VOC, walaupun penghasilan Pulau Bangka mencapai dua kali lipat dari permintaan VOC. Dengan demikian Sultan Palembang menentang monopoli perdagangan VOC. Oleh sebab itu ia tidak melarang penggelapan dan peyelundupan timah yang hasilnya hampir sama dengan permintaan timah dan lada dari VOC setiap tahunnya.

Adanya monopoli perdagangan timah dan lada yang dilakukan VOC di Palembang menekan pendapatan Kesultanan Palembang. Adapun Kesultanan Palembang penghasilannya ditentukan dari perdagangan dan pelayaran. Untuk perdagangan merupakan sumber penting sebagai penopang kemakmuran Kesultanan Palembang.

Namun adanya kontrak baru pada tahun 1776 tentang perdagangan timah dan lada itu tidak terjadi menyebabkan jumlah pembelian meningkat bagi VOC, tetapi penjualan oleh Sultan Mahmud Bahaudin tetap mengalami penurunan. Oleh sebab itu VOC terus menuntut hak monopoli perdagangan timah dan lada dari Sultan. Hal itu berakibat terjadinya persetujuan kontrak baru pada akhir pemerintahan Sultan Mahmud Bahaudin. Dengan adanya kontrak baru itu tetap tidak merubah keadaan pembelian timah dan lada VOC mengalami penurunan. Menurut laporan Residen Palembang.

Menurut laporan Residen Palembang pada 5 April 1788, VOC hanya melakukan transaksi pembelian 2.000 pikul dan penjualan ke Makao ditaksir 20.000 pikul dalam setahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembelian lada oleh VOC mengalami kemerosotan atau penurunan yang tajam. Sementara itu lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Pelabuhan Palembang bertambah ramai. Pada periode Oktober 1790 sampai Agustus 1792 terdapat sejumlah 374 kapal, yaitu kapal Nusantara, VOC, Cina dan Arab yang berlabuh di Palembang. Namun demikian kapal VOC hanya berjumlah 20 buah Untuk menghindari monopoli perdagangan VOC, Sultan Palembang mengalihkan lokasi pemasarannya di daerah Riau, yaitu perdagangan bebas. Pada saat itu perdagangan di Riau di bawah pengawasan pedagang-pedagang Bugis yang belum menjalin hubungan dengan VOC. Disamping itu jalur lalu lintas perdagangan sungai antara Riau ke Palembang pulang pergi relative lancar dan aman. Sejumlah barang dagangan diangkut dengan kapal-kapal dari Pelabuhan Palembang ke Riau dan selanjutnya ke Mataram. Monopoli perdagangan timah dan lada yang dilakukan oleh VOC di wilayah Kesultanan Palembang tidak berhasil sepenuhnya. Hal itu memiliki arti bahwa

bertambahnya pemasukan keuangan Kesultanan Palembang pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahaudin dan dengan demikian meningkat kesejahteraan rakyat dan pembangunan Kesultanan Palembang (Hanafiah, 1989 : 111-112)

Namun demikian Sultan Muhammad Bahaudin harus berhadapan dengan para penyelundup dan bajak laut di Bangka. Bangka, yang letaknya strategis dan memiliki penghasilan timah dan lada menjadikan daerah perdagangan bebas dan sekaligus daerah penyelundupan. Daerah ini menjadi lintasan bajak laut, bangsa Moro atau Zulu yang lebih dikenal orang Lanun (Illanum) dari selatan Philipina. Selain itu, daerah Bangka selalu mendapat ancaman dari orang-orang dari Lingga yang telah dua kali berusaha menguasai daerah itu. Untuk mengatasi kesulitan dari serangan orang-orang Lingga dan kerusakan bajak laut, Sultan Muhammad Bahaudin membangun benteng pertahanan dan menempatkan pasukan di bawah pimpinan Pangeran Adiwijaya di Mentok (Boedenani, 1961 : 30).

Sultan Muhammad Bahaudin mampu mengatasi gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh bajak laut di perairan Bangka dan Belitung, tetapi mengalami kesulitan dalam menghadapi penyelundupan timah dan lada. Kesulitan-kesulitan itu lebih disebabkan penyelundupan timah yang merupakan bagian dari kehidupan perdagangan. Hampir di setiap bagian pekerjaan terjadi penyelundupan, seperti yang dilakukan oleh penggali parit timah, pegawai, pedagang Cina dan Inggris.

Di samping itu terdapat perbedaan pengertian mengenai konsep penyeludupan. Di satu pihak VOC menganggap bahwa penyedelundupan merupakan suatu bentuk perdagangan di luar ketentuan monopoli, tetapi di pihak lain masyarakat menganggap penyelundupan sebagai suatu bentuk perdagangan bebas dari aturan yang telah ditetapkan VOC. Oleh sebab itu bagi Kesultanan Palembang penyelundupan memiliki pengertian ganda, yaitu pelanggaran atas hak-hak kesultanan dan suatu kewajiban apabila dilakukan oleh penguasa-penguasa atas nama sultan, tanpa memperhatikan ketentuan kontrak dengan VOC. Munculnya gejala penyelundupan itu lebih disebabkan oleh sistem perdagangan yang dilakukan VOC tidak memiliki pengawasan yang ketat.

Menurut laporan Residen Hemmij pada tahun 1783, terdapat sejumlah tempat penggalian timah di Bangka, yaitu di sepanjang pantai barat dan selatan 17 temoat penggalian, di pantai sebelah timur 9, dan di pantai sebelah utara 14. Penggalian timah itu dikerjakan oleh ribuan orang Cina. Hasil penggalian timah itu dikirim atau diserahkan ke Palembang. Namun demikian pengiriman timah itu sering mendapat gangguan sebab setiap penyerahan hasil timah dari satu tempat ke tempat yang lain secara kuantitas mengalami pengurangan sehingga sampai di Palembang tidak sesuai lagi dan satuan ukurannya tidak seragam.

Disamping itu orang-orang Cina yang berkerja di penggalian timah dan pedagang melakukan penjualan kepada penadah. Dengan demikian monopoli perdagangan yang dilakukan VOC di Palembang tidak berhasil bahkan mengalami kerugian. Kegagalan persekutuan dagang VOC dalam mencari keuntungan terjadi

dimana-man di Nusantara, oleh sebab itu pada akhirnya mengalami kehancuran pada 31 Desember 1799.

Sementara Sultan menerapkan sistem monopoli perdagangan sebagai sumber perekonomian. Rakyat diharuskan menanam tanaman tertentu, seperti lada untuk di jual kepada sultan dengan harga yang telah ditentukan sebagai gantinya pajak. Di samping itu, Kesultanan Palembang melakukan monopoli terhadap barang-barang impor, seperti garam, pakaian, kain, dan lain-lain yang dibutuhkan rakyat untuk wilayah Palembang. Apabila rakyat membutuhkan barang-barang impor itu, maka harus menukarkan produksi lada atau yang lain kepada sultan (Masyuri, 1983 : 75)

Sultan Muhammad Bahaudin memiliki pengaruh kuat di daerah sehingga mampu menguasai peredaran barang-barang Impor dan melakukan pengawasan terhadap rakyat. Oleh sebab itu sultan sebagai penguasa pusat mampu menetapkan jarga jual barang-barang impor untuk ditukar dengan produksi perkebunan rakyat. Pertukaran antara barang-barang impor dengan lada di Kesultanan Palembang disebut *tiban*, sedangkan pembelian dengan uang produksi lada rakyat oleh Sultan disebut *tukon*. Akan tetapi harga lada hampir di setiap marga berbeda-beda sesuai dengan ketetapan Sultan (Masyuri, 1983 : 78)

Dalam menjalankan perdagangan Sultan di bantu *raban* dan *jenang* bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, seperti pesirah, dan proatin. Dengan melalui jalur lembaga-lembaga itu aktivitas monopoli perdagangan kesultanan dapat berlangsung. Pejabat-pejabat pelabuhan di Palembang memiliki kekuasaan dalam pengiriman barang dagangan yang merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat desa. Barang dagangan itu diperoleh dari pedagang-pedagang Cina, Jawa, Melayu, Bugis dan Arab yang dibawa dari Batavia dan Riau. Kemudian barang dagangan itu oleh penguasa pelabuhan yang dibantu *raban* dan *jenang* disalurkan ke berbagai marga.

Ekonomi Perdagangan Masa Kesultanan Sultan Muhammad Bahauddin (1803-1821) dan Akhir Kesultanan Palembang

Pengganti Sultan Muhammad Bahauddin adalah putra sulungnya, Raden Hasan Pangeran Ratu bergelar Sultan Mahmud Badaruddin II yang berkuasa pada tahun 1803-1821. Sejak awal pemerintahannya, Sultan Mahmud Badaruddin II telah menghadapi persoalan yang rumit yang belum terselesaikan. Di satu pihak, ia harus berhadapan dengan pemerintahan Belanda yang ingin tetap berkuasa di Nusantara dan di lain pihak harus berhadapan dengan kedatangan pasukan Inggris yang juga ingin berkuasa di Nusantara (Pemerintah Provinsi Daerah TK. I Sumatera Selatan, 1986 : 6).

Dalam menghadapi Belanda dan Inggris, Sultan membangun sistem pertahanan yang didasarkan atas pertimbangan kekuatan lalu lintas sungai. Ia telah membangun benteng-benteng yang dindingnya diberi lubang untuk menembak dan di bagian atas terdapat tempat untuk melihat kedatangan musuh. Benteng-benteng

pertahanann dibangun pada tempat-tempat tertentu di sepanjang Sungai Musi, yaitu Sungsang sampai Muara rawas. Bangunan benteng itu biasanya diperkuat dengan tiang-tiang kayu yang dipancangkan ke dalam air, seperti benteng Kuto besak yang dikelilingi parit yang lebar, Benteng Pulau Kemaro, Hangun Topo, dan Tambak Boyo (Sevenhoven, 2015 : 13-14). Hal itu untuk pengamanan daerah maritime yang berhubungan dengan perdagangan rempah-rempah, seperti cengkeh, lada, kopi, dan hasil tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung.

Dalam bidang ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin II telah melakukan sistem perdagangan bebas. Setiap negara diberikan kebebasan berdagang di Kesultanan Palembang, tidak ada monopoli perdagangan. Ia juga menolak tuntutan Inggris yang berusaha menggantikan kedudukan Belanda, yaitu memegang monopoli perdagangan timah dan Lada di Pulau Bangka. Di samping itu Inggris menuntut Sultan Mahmud Badaruddin II Wajib menghormati perjanjian antara Inggris dan Belanda yang berarti pengambil-alihan kekuasaan atas Loji Sungai Aur dari tangan Belanda kepada Inggris.

Pada 8 Juli 1821 Sultan Mahmud Badaruddin II beserta kelaurganya tertangkap dan diangkut dengan kapal menuju Batavia. Selanjutnya pada Maret 1822 ia diasingkan ke Ternate. Sebagai penggantinya, pada 16 Juli 1821 de Kock mengangkat Pangeran Prabu Anom sebagai Sultan Palembang. Sejak Pangeran Prabu Anom menjadi Sultan Palembang seluruh kebijakan politik ditentukan oleh Belanda, jabatan-jabatan penting dipegang oleh orang-orang Belanda. Sultan sebagai simbol penguasa dan pegawai-pegawai pemerintah digaji oleh Belanda sebagai imbalan bekerja. Oleh sebab itu secara de facto Kesultanan Palembang telah berakhor pada tanggal 16 Juli 1821. Namun demikian Kesultanan Palembang secara resmi dihapus pada tanggal 9 Agustus 1825, yang ditandai dengan seluruh wilayah kekuasaannya di bawah pemerintahan Belanda (Supriyanto, 2013 : 79)

Ketika Belanda telah menguasai daerah Kesultanan Palembang sepenuhnya, aktivitas perdagangan di Pelabuhan Palembang tidak mengalami penurunan. Lalu lintas perdagangan pengangkutan barang dagangan yang berupa hasil dari daerah pedalaman, tidak mengalami hambatan. Sistem baru yang diperkenalkan pemerintah colonial, eksploitasi perdagangan terutama timah dan lada, berakibat melemahnya ekonomi masyarakat Palembang. Akan tetapi aktivitas pelabuhan Palembang masih tetap mengokohkan predikat Pelabuhan Palembang sebagai urat nadi ekonomi masyarakat Palembang.

KESIMPULAN

Munculnya Kesultanan Palembang pada abad ke 17-19 telah melatarbelakangi kehidupan masyarakat Palembang. Periode itu menjadi menarik ketika dihubungkan dengan dunia perdagangan sebab Kesultanan Palembang telah menjalin kerjasama dengan VOC pada tahun 1642. Hal tersebut berpengaruh ke sistem ekonomi perdagangan pada masa Sultan Palembang berkuasa pada saat itu.

a. Ekonomi Perdagangan Masa Kesultanan Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757)

Pada masa ini ekonomi Palembang tergantung pada produk baru lada dari pedalaman Palembang dan timah dari Bangka. Sultan mendatangkan orang-orang dari Bugis dan Cina untuk menambang timah di Bangka. Sebagian hasil di monopoli oleh VOC dan sebagian lain diperdagangkan secara liar dengan harga yang lebih tinggi oleh VOC. Hal ini mengakibatkan ekonomi perdagangan masa ini kurang stabil.

b. Ekonomi Perdagangan Masa Kesultanan Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803)

Pada masa ini ekonomi perdagangan mulai berkembang karena Sultan sangat memanfaatkan pelabuhan dengan baik sebagai kegiatan perdagangan dengan pedagang asing dari berbagai negara. Adanya Syahbandar yang mengatur lalu lintas perdagangan serta mengamankan pedagang asing dari para perompak. Pelabuhan Palembang menjadi ramainya pelabuhan karena merasa aman untuk melakukan hubungan perdagangan di sana. Selain itu, Sultan juga mendatangkan penambang dari Siam. Tetapi pada masa itu, masih terjadi penyelundupan timah dan lada oleh pedagang liar. Kemudian juga sultan menyuruh rakyat untuk menanam lada untuk menopang perekonomian masyarakat Palembang

c. Ekonomi Perdagangan Masa Kesultanan Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821)

Dalam bidang ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin II telah melakukan sistem perdagangan bebas. Setiap negara diberikan kebebasan berdagang di Kesultanan Palembang, tidak ada monopoli perdagangan. Ia juga menolak tuntutan Inggris yang berusaha menggantikan kedudukan Belanda, yaitu memegang monopoli perdagangan timah dan Lada di Pulau Bangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Abdurrahmansyah. 2020. *Pengajaran Islam di Kesultanan Palembang Abad Ke-18 dan 19 M (Studi Terhadap Materi dan Model Pembelajaran)*. Repository UIN Raden Fatah Palembang.
- Anthony Reid. , 2010. *Sumatera Tempo Doeloe dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta : Komunitas Bambu
- Boedenani dan David.1961. *Tambo Kerajaan Sriwijaya* Bandung : Teratai.
- Choirun Niswah,2015. *Sejarah Pendidikan Islam*.Palembang: IAIN Raden Fatah Press
- Daliman. 2012. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Ombak
- Denys Lombard. 1991. *Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djohan Hanafiah 1989. *Palembang Zaman Citra Palembang Tempoe Doeloe* (Palembang : Humas Pemda. Kotamadya Palembang

- E.P. Wieringa, 1990. *Semajan 2, Cerita Bangka het Verhaal van Bangkas* .Leiden : Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost Azie en Oceanie Rijkuniversiteit
- Enung K Rukiati, dkk., 2004. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Herlina , Nina. 2008. *Metode Sejarah* . Bandung: Satya Historika.
- _____. 2009. *Historiografi Indonesia Dan Permasalahnya* . Bandung: Satya Historika.
- Husni, Dardiri et al. .2006. *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Riau: Istitute forSoutheast Asian Islamic Studis (ISAIS), UIN Suska dengan Alaf Riau-Pekanbaru
- Husni Rahim.1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Irwanto, Dedi. Dkk. 2010. *Iliran Dan Uluan: Dinamika Dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Ega Publisher.
- Irwanto, Dedi. 2011. “*Venesia Dari Timur, Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial*”. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Ismail.,2014. *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik Di Karesidenan Palembang 1925-1945.*, Yogayakarta : Idea Sejahtera
- J.L Van Sevenhoven. 2015. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Yogyakarta: : Ombak
- Jeroen Peeters, 1997. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Terjemahan sutan maimoen. Jakarta: INIS
- K.H.O. Gadjahnata dan Sri-Edi Swasono, 1988. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta : UI Press
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta:Tiara Wacana
- L.W.C. Van den Berg. 1989. *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: Seri INIS.
- M.C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta
- Minsih. 2010. *Perkembangan Islam Pada Masa Sultan MuhammadBaharudin Di Kesultanan Palembang (1776-1805)*||, tersedia pada laman: <http://digilib.uin-suka.ac.id/4616/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023
- Pemerintah Provinsi Daerah TK. I Sumatera Selatan. 1986 *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II Pahlawan Kemerdekaan Nasional*. Sumatera Selatan
- Rochmiatun, Endang. 2018. *Elite Lokal Palembang Abad XIX sampai Abad XX: Kajian Terhadap Kedudukan Dan Peran _Haji Mukim*, dalam Jurnal Adabiyah Vol. 18 Nomor 1/2018
- Sair, Alian.,2012. *Criksetra Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*.Palembang : FKIP Sejarah Universitas Sriwijaya

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : P3PK Universitas Gajah Mada

Supriyanto, 2013. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864* Yogyakarta : Ombak

Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Tim Peneliti IDKD, 1983. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan* . Palembang : P & K

Pemerintah Provinsi Daerah TK. I Sumatera Selatan. 1986 *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II Pahlawan Kemerdekaan Nasional*. Sumatera Selatan

Yass, Marzuki AB. 2004. *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Palembang : Universitas Sriwijaya

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License